

# **TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN**

## **Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif**

**Editor**

Winda Hardyanti  
Demeiati Nur Kusumaningrum

---

# TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN

## Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif

---

Penulis

: Rachmad K. Dwi Susilo  
Oman Sukmana  
Najamuddin Khairur Rijal  
Asep Nurjaman  
Gonda Yumitro  
Listiana Asworo  
Saiman  
Ana Cordeiro  
Dion Maulana Prasetya  
Demeiati Nur Kusumaningrum  
Shannaz Mutiara Deniar  
Budi Suprpto

Design

: Elin W

### **Penerbit Gre Publishing**

Jln. Kelurahan  
Karangwaru Lor TR II/211E Yogyakarta - Indonesia  
<http://grepublishing.com>

bekerjasama dengan:

### **Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP)**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang

ISBN 978-602-7677-42-5

---

Dilarang keras mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

# Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera,

Alhamdulillah atas nikmat kesehatan dan waktu yang bermanfaat, akhirnya buku kumpulan karya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dapat diterbitkan.

Selamat saya ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah berkenan menyajikan gagasan dan kajian kritisnya terhadap isu-isu kontemporer yang menarik ini. Terima kasih atas kinerja tim Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) dalam dua tahun ini mampu menggugah gairah menulis dan membangun iklim akademik yang berkemajuan di lingkungan FISIP.

Mudah-mudahan semangat berbagi dan berkarya dosen-dosen FISIP tetap menyala dan hasil dari kajian kritis dalam buku ini dapat memberikan makna positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang sosial humaniora.

Salam sukses dan selamat membaca.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, Desember 2017

Dekan FISIP UMM  
Dr. Rinikso Kartono, M.Si



# PENDAHULUAN

B erada pada sebuah era digitalisasi, dimana semua negara, tak terkecuali negara berkembang, saat ini tengah mengalami tantangan yang beraneka ragam. Mulai dari tantangan di bidang ekonomi, politik, ideologi, hingga tantangan dalam bidang hubungan antar negara. Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang pun tak lepas dari geliat tantangan-tantangan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah tantangan di bidang ekonomi, khususnya ketika menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA. MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Pasar tunggal dan basis produksi melalui skema MEA diyakini mendorong kawasan Asia Tenggara lebih dinamis dan berdaya saing dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. Ini menjadi tantangan tersendiri, tak terkecuali bagi para *social worker* di Indonesia. Solusi menghadapi tantangan ini diungkap dalam sebuah artikel dalam buku ini yang berjudul Peluang dan Tantangan Bagi Social Worker Indonesia dalam Menghadapi Era MEA.

Selain tantangan menghadapi MEA, pasca reformasi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal gerakan revivalisme Islam serta dalam hal stabilitas sistem kepartaian di Indonesia mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pasca reformasi, kran kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk berpolitik, berkumpul dan berpendapat dibuka seluas-luasnya, termasuk terhadap gerakan Islam. Sejak itu, berbagai gerakan Islam transnasional, partai politik, dan ajaran yang mengintegrasikan dengan budaya lokal muncul dan tumbuh pesat. Hanya saja dalam perkembangan terkini kondisi yang disebut sebagai revivalisme ini menghadapi banyak persoalan, termasuk kelemahan mereka dalam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan riil di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit di antara aktivis Islam yang terjebak dengan tindakan-tindakan pragmatis yang jauh dari nilai-nilai Islam sebagaimana yang mereka suarakan. Dalam hal sistem kepartaian di Indonesia, sejumlah partai besar di Indonesia juga mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan. Realitas ketidakstabilan perolehan suara partai (*electoral volatility*) secara individual menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia pasca Orde Baru hingga saat ini masih tidak stabil. Selain itu adanya pergeseran terkait konsep keamanan negara yang dulunya berfokus pada *state security* dan kini mengarah ke *human security* juga menimbulkan tantangan tersendiri. Konsep atau gagasan *human security* melahirkan banyak interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. Sejumlah artikel dalam buku ini mengupas berbagai tantangan tersebut dan berupaya untuk mendiskusikan solusi bagaimana tantangan Indonesia dalam bidang politik yang dikaji dalam sejumlah perspektif menarik dari sudut pandang keilmuan sosial, politik, pemerintahan, komunikasi dan juga perspektif hubungan internasional.

Buku bunga rampai ini sejatinya adalah sebuah kolaborasi menarik dari sejumlah pemikir kajian sosial politik, komunikasi dan hubungan internasional yang mencoba untuk menelaah bagaimana seharusnya Indonesia bisa menempatkan posisinya sebagai negara yang tak terlepas dari tantangan-tantangan di era digitalisasi seperti saat ini. Tujuan buku ini adalah untuk mengelaborasi bagaimana posisi negara kita dan

apa saja solusi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan bersama kita mewujudkan Indonesia sebagai negara bermartabat, demi terciptanya Indonesia Berkemajuan.

**Editor,**

Winda Hardyanti





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Pendahuluan.....	v
Daftar Isi .....	ix

Peluang dan Tantangan <i>Social Worker</i> Indonesia Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	
<b>Oman Sukmana</b> .....	1
Tantangan Pancasila dalam Tafsir Kosmopolitanisme	
<b>Najamuddin Khairur Rijal</b> .....	19
Stabilitas Sistem Kepartaian Indonesia Pasca Orde Baru	
<b>Asep Nurjaman</b> .....	39
Model dan Perkembangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pasca Reformasi	
<b>Gonda Yumitro</b> .....	61
Menembus Ortodoksi Paradigma ‘Keamanan’ : Melampaui <i>State Security</i> Menuju Urgensi <i>Human Security</i>	
<b>Listiana Asworo</b> .....	79
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu ( <i>Integrated Water Resource Management</i> ) untuk Konservasi Air di Kota Batu, Jawa Timur	
<b>Rachmad K. Dwi Susilo</b> .....	97

<i>Electronic Government</i> Pada Pemerintah daerah Menuju <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik <b>Saiman</b> .....	115
<i>Traditions: keeping the balance between the old and the new</i> <i>(A study on the abstract notion of Portuguese traditional</i> <i>culture )</i> <b>Ana Cordeiro</b> .....	135
Kebangkitan “Aseng”? Studi Sejarah tentang Muncul dan Berkembangnya Konflik Etnis Jawa-Tionghoa <b>Dion Maulana Prasetya</b> .....	147
Harmonisasi ASEAN Membangun Identitas Regional <b>Demeiati Nur Kusumaningrum &amp;</b> <b>Shannaz Mutiara Deniar</b> .....	163
Kerangka Kerja Komunikasi Politik dan Peranan Media Massa <b>Budi Suprpto</b> .....	179
 Biodata Penulis.....	 201

# Menembus Ortodoksi Paradigma ‘Keamanan’: Melampaui *State Security* Menuju Urgensi *Human Security*

Oleh : Listiana Asworo

## PENDAHULUAN: MENYOAL ORTODOKSI KONSEP KEAMANAN

Tulisan sederhana ini hendak merefleksikan ulang gagasan keamanan. Studi keamanan setidaknya sebelum berakhirnya Perang Dingin didominasi kajian-kajian yang bersifat *state centric*. Yakni, pendefinisian keamanan dan ancaman merujuk pada eksistensi sebuah negara. Teori keamanan klasik *state centric* hanya memfokuskan pada soal keselamatan negara dari bahaya yang berasal dari internal ataupun dari wilayah eksternal. Sehingga yang ditekankan untuk memastikan keamanan negara terjamin adalah nalar institusional. Hadirnya lembaga atau institusi yang berfungsi untuk melindungi serta memastikan keadaan aman bagi negara membuat gagasan keamanan menjadi sangat kaku dan konvensional. Bahwa yang berhak menentukan segenap langkah atau kebijakan terkait keamanan adalah mutlak negara. Pasca Perang dingin berakhir, gagasan tentang ancaman dan keamanan dipersoalkan kembali. Momentum tersebut merekonstruksi ulang tentang apa yang dimaksud sebagai ancaman dan keamanan itu sendiri. Jika kajian keamanan klasik menempatkan negara sebagai pusat keamanan. Kini, dengan berakhirnya Perang Dingin gagasan tentang keamanan merujuk pada keamanan atau keselamatan manusia. Konsep keamanan tidak lagi dimaknai sebagai sebuah pemikiran yang final. Tetapi ide tentang keamanan yang modern adalah *beyond state centric*. Keamanan sejatinya merupakan gagasan yang selalu diperdebatkan, karena ia merepresentasikan tentang apa yang

dimaksud ancaman bagi manusia, baik sebagai individu maupun kolektivitas.

Sebelum masuk ke dalam pergeseran paradigma keamanan, ada baiknya memahami terlebih dahulu istilah keamanan. Secara epistemologi keamanan berasal dari bahasa Latin, yakni “*se*” yang bermakna “tanpa” dan “*curus*” yang berarti “kegelisahan”. Keamanan, jika demikian dapat dirumuskan atau dimengerti sebagai sebuah situasi tanpa resiko atau situasi tanpa ancaman (Lay, 2009). Seiring perkembangan tentang ancaman terhadap kelangsungan manusia itu sendiri, maka kebijakan menyangkut keamanan manusia juga mengikuti gerak dinamikanya. Perluasan makna di atas membawa keamanan ke tingkatan yang lebih rumit dan kompleks. Yaitu, ancaman manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok kolektivitas. Ancaman-ancaman terhadap eksistensi manusia itu sendiri berada dalam lima ranah penting: militer, politik, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Pada hakikatnya, gagasan keamanan *state centric* dinilai sudah tidak memadai atau relevan lagi digunakan untuk memahami keamanan yang spektrumnya kini lebih luas. Ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan (*survival*) manusia tidak bisa lagi diselesaikan dengan mengandalkan kekuatan institusi keamanan dan pertahanan negara. Perlu formula lain untuk mendesain konsep keamanan yang lebih reflektif. Isu lingkungan misalnya, telah sampai pada kesepakatan global bahwa ancaman yang berasal dari lingkungan memiliki dampak serius bagi keamanan manusia, negara, maupun global. Sebagai contoh kerusakan lingkungan yang mengakibatkan problem serius dalam kelangsungan kehidupan di muka bumi. Faktanya bukan hanya persoalan sederhana. Kerusakan lingkungan pada titik paling ekstrim membawa peperangan dan kematian manusia (Nainggolan, Tanpa Tahun:74). Tidak berlebihan jika kini lingkungan menempati isu sentral dalam diskursus soal keamanan manusia (*human security*) jika melihat dampak yang ditimbulkannya. Langkah antisipasi yang digalakkan oleh komunitas global adalah dengan beramai-ramai membawa isu lingkungan ke dalam forum-forum global guna memikirkan solusi tepat untuk menyelamatkan dunia dan manusia.

## KAJIAN KLASIK TEORI KEAMANAN: SEKILAS JEJAK

Mendiskusikan gagasan keamanan tidak bisa hanya didekati dengan satu perspektif tertentu. Memang lazimnya studi tentang keamanan kerap dikaitkan dengan fungsi dasar atau fungsi klasik suatu negara. Bahwa negara harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh komponen masyarakat yang ada di negara tersebut. Tidak heran jika pendefinisian atas apa yang disebut sebagai ancaman adalah dalam kerangka pikir *state centric*. Bagi negara, yang dimaksud sebagai ancaman dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang datang dari luar negara. Mengupayakan masyarakat agar terhindar dari situasi *homo homoni lupus* merupakan fungsi utama negara dengan melakukan serangkaian tindakan dengan mendasarkan pada teori-teori kontrak sosial. Dalam pemikiran Hobbes misalnya, bahwa upaya mencari kedamaian dalam situasi konflik dan peperangan dalam masyarakat, yang perlu dilakukan adalah dengan menyerahkan secara sadar hak-hak mereka kepada kekuasaan tunggal yang diijinkan untuk bertindak atas nama mereka (Noer, 1996). Perspektif inilah yang kemudian melahirkan (1) fungsi keamanan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, terutama polisi; (b) menjadi rujukan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi kepolisian yang mencakup fungsi perlindungan, penegakan hukum, dan kamtibmas (Lay, 2009).

Di sisi lainnya, konsep keamanan juga digali dari pemahaman tentang bahaya atau ancaman yang datang dari eksternal. Ancaman dari luar ini kerap dikaitkan dengan ancaman militer. Sehingga, terminologi keamanan dalam cara pandang ini nyatanya jauh lebih klasik, yakni memastikan bekerjanya fungsi negara dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakatnya. Untuk memberikan perlindungan dan keamanan itulah kemudian negara membentuk alat pertahanannya sendiri, yang dalam konteks modern dikenal sebagai tentara. Kebutuhan memiliki angkatan perang sendiri merupakan keharusan untuk tidak hanya memberikan keamanan bagi warganya, tetapi juga menjadi instrument pertahanan kedaulatan wilayahnya.

Karya filsafat praktik kenegaraan, seperti karya Kautilya merefleksikan bahwa keamanan bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara spontan dan tidak harus selalu dihadapi dengan kekuatan perang. Ancaman terhadap keamanan sangat bervariasi dan melibatkan proses yang panjang. Demikian pula, bahwa setiap variasi dapat direduksi atau bahkan ditiadakan melalui pengembangan mekanisme peringatan dini yang baik. Karena itu, kebutuhan untuk memahami, baik proses ekstrimnya ancaman maupun pencegahannya menjadi sama pentingnya dalam studi keamanan. Perkembangan inilah yang kemudian meletakkan dasar keberadaan intelijen: (a) sebagai aktor/ lembaga yang memiliki fungsi cukup otonom; (b) memunculkan fungsi-fungsi spesifik intelijen mulai pengumpulan informasi, analisa, dan perumusan rekomendasi kebijakan, menjalankan tindakan *spionase* (Hayati, dkk, 2011: 161); (c) sebagai basis bagi pembangunan sistem peringatan dini (Lay, 2009). Dengan demikian, upaya antisipasi sama pentingnya dengan memahami proses ancaman itu sendiri.

Telaah konsep keamanan diatas hendak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan atas suatu ancaman baik dari internal maupun eksternal terkonsentrasi pada negara. Menurut teori klasik ini, negara *lah* yang patut diselamatkan atas berbagai bahaya atau ancaman yang melingkupinya. Sehingga tidak heran jika penguatan lembaga atau institusi menjadi solusi yang dipilih negara dalam upaya antisipasi maupun reduksi suatu ancaman. Negara memiliki kewenangan penuh bagaimana keamanan itu didefinisikan.

## **ENVIRONMENT SECURITY: DARI HARMONISASI HINGGA KONTRADIKSI**

Paradigma keamanan berubah seiring dengan dinamika persoalan ancaman itu sendiri. Jika teori keamanan klasik menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam pendefinisian atas keamanan dan ancaman. Maka, kini studi-studi keamanan modern berpijak pada ancaman terhadap nasib manusia sebagai kolektivitas maupun individu. Barry Buzan misalnya,

menempatkan isu keamanan pada upaya bagaimana kolektivitas manusia membebaskan diri dari ancaman dan dapat *survive*. Perluasan makna keamanan menemukan momentumnya terutama sejak tahun 1990-an dimana spektrum ini tampak dari rumusan yang dikemukakan PBB yang mengharuskan konsep “keamanan terhadap” diubah dari “penekanan pada keamanan nasional” atau “keamanan negara” ke arah penekanan yang lebih besar pada “*people security*” atau “*human security*”. Pencapaiannya pun juga mengalami pergeseran tekanan, dari keamanan yang diwujudkan melalui “*armament*” ke arah keamanan yang dicapai melalui “*human development*”; dari penekanan pada keamanan “*territorial*” ke arah “*food employment and environment security*” (Lay, 2009).

Di antara lima ranah yang menjadi fokus kajian *security* modern, isu lingkungan menjadi kekuatan penting dalam politik keamanan. Dalam perkembangannya, isu lingkungan telah bergeser secara jauh dari posisi awalnya sebagai isu minor dalam politik global, menjadi semacam ideologi yang bisa diartikan sebagai humanisme global. Dalam konteks inilah isu lingkungan berada dalam posisi strategis kajian keamanan. Sebagai ideologi humanisme global, lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik pijak bagi politik keamanan sebagai instrument pengaturan kepentingan bersama. *Pertama*, lingkungan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang “kedaulatan” negara modern. Bahkan rezim paling otoriter sekalipun tidak memiliki cukup kuasa untuk membentengi negaranya. Asap misalnya, tidak akan pernah bisa dicegah untuk tidak bermigrasi ke wilayah teritorial negara tetangga. *Kedua*, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan batasan waktu. Artinya adalah, lingkungan memiliki variasi makna mulai dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, dan juga ruang dalam makna fisiknya. *Ketiga*, lingkungan memiliki kekhasan daya hukum yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan, yakni indiskriminatif. Berbagai musibah dan bencana yang datang silih berganti sebagai akibat logis dari

kealpaan memperlakukan lingkungan secara wajar melanda siapa saja tanpa mempedulikan kelas sosial, suku, agama, dan karakteristik pembeda lainnya (Lay, 2007:156--158).

Posisi strategis isu lingkungan seperti halnya di atas, melahirkan pola relasi atau jejaring yang rumit sekaligus kompleks. Bencana yang diakibatkan lingkungan merefleksikan bahwa upaya melindungi keamanan manusia melalui penyelamatan lingkungan hanya bisa dilakukan dengan membangun kesadaran bersama. Sinergi dan kolaborasi di dalam komunitas global sebagai upaya mencari jalan tengah atas kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan menjadi penggambaran interaksi jejaring paling kompleks. Tidak hanya soal bagaimana saling berbagi peran dalam sebuah agenda penyelamatan lingkungan. Tetapi juga menyuguhkan perdebatan pelik atas siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Agenda REDD+ misalnya, menjadi penegas bahwa lingkungan menjadi salah satu isu global yang mampu mengajak berbagai komunitas global untuk duduk memikirkan kelangsungan kehidupan di bumi. Namun, upaya penyelamatan itu tidak secara otomatis mendamaikan perebutan kepentingan atas lingkungan antara negara maju dengan negara berkembang (Angelsen dan Atmadja, 2010:45-53).

## ***HUMAN SECURITY: MELAMPAUI DISKURSUS STATE SECURITY***

Kini, diskusi tentang keamanan kontemporer erat kaitannya dengan gagasan tentang *human security*. Sebelum gagasan tentang *human security* muncul, global dihadapkan pada dua dominasi besar yakni, pembangunan ekonomi (kebijakan luar negeri) dan keamanan militer. Namun, dua kekuatan yang menjad kiblat dunia ini mengalami kekacauan seiring dengan berakhirnya perang dingin tahun 1990-an (King dan Murray, 2002:587). Berakhirnya Perang Dingin telah mengalihkan para ahli studi keamanan yang mencoba mengkonstruksikan kembali apa yang disebut dengan 'keamanan'. Mahbub Ul-Haq misalnya, meluncurkan Laporan



Pembangunan Manusia yang menegaskan bahwa pembangunan harus difokuskan pada orang-orang (meskipun dikelompokkan berdasarkan negara) daripada keamanan batas-batas nasional mereka, yakni dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik di samping kesejahteraan ekonomi. Sehingga, yang dimaksud dengan pembangunan manusia tidak terbatas pada pendapatan, tetapi aspek *non-income* juga perlu mendapat perhatian. Gagasan tersebut juga menjadi faktor dalam mengukur *Human Development Index*. (King dan Murray, 2002: 589).

Pasca Perang Dingin konsep *human security* telah menggeser dominasi *state security*. Ada dua peristiwa besar yang mendorong lahirnya *human security*, yakni *pertama*, berakhirnya perang dingin. Runtuhnya Negara yang dimulai pada akhir Perang Dingin menyebabkan terjadinya perang saudara. Keamanan yang dilakukan oleh Negara tidak bisa menangkap dinamika tersebut yang juga gagal dalam menghadapi ancaman *non-military* untuk Negara dan rakyatnya. Sebagai contoh, migrasi massal, kejahatan transnasional, bencana lingkungan, hutang dan penyakit (MacArthur, 2008:424). *Kedua*, globalisasi juga berperan dalam menciptakan pembangunan yang tidak merata, terjadi perubahan teknologi dan politik yang juga mempengaruhi kestabilan keamanan Negara. *Human security* kemudian menempati diskursus sentral dalam diskusi-diskusi kebijakan luar negeri. Seperti komitmen G8 yang menyatakan pada Juni 1999 bahwa mereka bertekad untuk memerangi penyebab ancaman *multiple* keamanan manusia. Meskipun definisi keamanan manusia, agenda penelitian dan kebijakan keamanan manusia itu sendiri masih belum jelas (King dan Murray, 2002:590).

Konsep atau gagasan *human security* melahirkan banyak interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. Keamanan manusia berada pada regangan dua kutub besar yang banyak mempengaruhi ide atau konsep tentang *human security* itu sendiri. Sehingga belum ada pendefinisian yang baku atau utuh tentang apa yang dimaksud dengan keamanan manusia,

karena masing-masing kutub (*East versus West*) memiliki argumentasi dan konsep sendiri tentang *human security*. *Pertama* adalah perspektif atau pendekatan yang berasal dari Timur (Asia). Keamanan manusia dalam cara pandang Negara-negara Asia bisa dilacak dari hasil inovasi UNDP Tahun 1994 yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mahbub Ul-Haq. Setidaknya ada tujuh komponen yang menjadi landasan atau cakupan jika membicarakan keamanan manusia: *economic security* (misalnya, terbebas dari jerat kemiskinan), *food security* (akses terhadap makanan), *health security* (akses terhadap perawatan kesehatan, perlindungan dari penyakit), *environment security* (akses perlindungan terhadap suplai air, udara bersih dan dari bahaya seperti polusi lingkungan dan penipisan), *personal security* (aman dari kekerasan fisik dan ancaman lainnya seperti perang, peniksaan,dsb), *community security* (bicara tentang keamanan budaya tradisional, kelompok etnis,dsb), dan *political security* (perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dan kebebasan) (Acharya, 2001:445).

Beberapa pemerintah negara-negara di kawasan Asia melihat keamanan manusia sebagai upaya lain oleh Barat untuk memaksakan nilai-nilai liberal dan lembaga-lembaga politik pada masyarakat non-Barat. Sehingga konsep tentang keamanan juga bicara soal kontestasi politik atas apa yang disebut keamanan manusia. Argumentasi Rolland Paris menyebutkan bahwa pendefinisian klasik atas konsep keamanan yang dahulu sempit (ancaman yang berasal dari militer dan nuklir) juga mempengaruhi ruang lingkup keamanan manusia sendiri sehingga menjadi sangat luas, dimana masing-masing individu bisa bicara tentang konsep keamanan manusia yang digagasnya. Dengan demikian, keamanan manusia bisa dilihat dalam berbagai perspektif: ia bisa dimaknai sebagai seruan, kampanye politik maupun keyakinan tentang sumber konflik baru (Paris, 2001:87-112).

Pendekatan *kedua* banyak digagas oleh Kanada, Norwegia dan Negara-negara Barat lainnya. Mereka memulainya dengan mengkritik laporan UNDP tentang luasnya konsep keamanan manusia. Pendekatan ini mengkritik gagasan yang diyakini oleh kawasan Asia yang berfokus terlalu banyak

pada ancaman yang terkait dengan *underdevelopment*, sementara mengorbankan atau mengabaikan ketidakamanan manusia akibat konflik kekerasan. Gagasan keamanan manusia dalam pandangan Kanada dan dunia Barat banyak dipengaruhi doktrin-doktrin piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa yang menjadi unsur-unsur inti dalam mendiskusikan ide tentang keamanan manusia. Misalnya keamanan manusia harus didudukkan dalam kerangka tentang hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, perempuan dan anak-anak di daerah konflik, tentara anak-anak, pekerja anak, dan lain sebagainya. (Acharya, 2001:445).

Pada dasarnya, keamanan manusia (*human security*) merupakan respon terhadap kegagalan keamanan tradisional yang *state centric* dan kerangka keamanan yang militeristik. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa keamanan manusia pertama kali mendapat pengakuan Internasional (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia program pengembangan PBB pada tahun 1994. Laporan ini menggambarkan tujuh jenis keamanan yakni, ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat dan politik. Formulasi ini merupakan tantangan langsung terhadap paradigma tradisional. Dan kemudian muncul konsep-konsep baru yang ditawarkan oleh analisis. Mahbub Ul-Haq misalnya menegaskan bahwa keamanan manusia kini menjadi perhatian dominan di komunitas global. Menurutnya, kini yang dimaksud keamanan adalah keamanan orang, bukan hanya wilayah; keamanan individu, bukan hanya dari Negara-negara; keamanan melalui pembangunan, bukan melalui senjata; keamanan untuk semua orang dimana pun: di rumah mereka, dalam pekerjaan mereka, di jalan-jalan mereka, dalam komunitas mereka dan dalam lingkungan mereka (MacArthur, 2008:425). Sementara itu, Komisi Keamanan Manusia (*Commission on Human Security*) menegaskan bahwa sejatinya negara tetap menjadi penyedia keamanan. Negara harus mengubah perspektif konvensionalnya karena gagal dalam memberikan kewajiban keamanan, perhatian sekarang harus bergeser dari keamanan untuk Negara menjadi keamanan untuk manusia (Tsai, 2009:9).

Dalam konteks ini, tulisan ini tidak berupaya untuk memposisikan sebagai penganut pandangan tertentu. Akan tetapi untuk memfokuskan diskusi, yang akan dielaborasi lebih dalam adalah mengenai keamanan lingkungan. Lingkungan juga merupakan *scope* dari keamanan manusia itu sendiri. Dalam tulisan ini, isu lingkungan adalah salah satu elemen yang juga harus mendapatkan perhatian dari Negara dan komunitas global. Karena kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung keamanan manusia itu sendiri, atau dampak yang ditimbulkannya juga dapat mempengaruhi keamanan global. Sehingga, lingkungan harus didudukkan sebagai salah satu pondasi dasar dalam meletakkan kerangka keamanan yang lebih revolusioner. Dengan demikian, penting untuk menjelaskan bagaimana lingkungan juga menjadi salah satu komponen keamanan yang juga harus dipikirkan tidak hanya oleh sebuah Negara tetapi juga untuk *scope* yang lebih luas yakni, komunitas global.

## URGENSI LINGKUNGAN SEBAGAI DOMAIN *HUMAN SECURITY*

Polemik klasik antara lingkungan dengan pembangunan industrial misalnya, pada akhirnya menerima lingkungan sebagai faktor yang juga mempengaruhi cara berpikir para *policy maker* dalam mengambil keputusan publik. Kini, wacana tentang pembangunan selalu dikaitkan dengan keberlanjutan ekologi. Misalnya, di Amerika Serikat, para *policy maker* bersepakat jika sejatinya keamanan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan itu sendiri. Jika terjadi kerusakan maka secara tidak langsung akan mengganggu stabilitas perekonomian di suatu Negara tersebut. Mereka sadar bahwa ancaman yang bersifat ekologi jauh lebih panjang dampaknya daripada ancaman yang disebabkan oleh militer. Sebab, ancaman ekologi juga akan membawa dampak terhadap perekonomian suatu negara. Dengan demikian, mengupayakan keamanan lingkungan berarti juga mengupayakan untuk menyelamatkan perekonomiannya. Diterimanya isu lingkungan sebagai faktor yang juga

berpengaruh besar terhadap pembangunan, telah mengalahkan paradigma yang selama ini diyakini oleh Negara Barat yakni, kapitalisme. Para penganut kapitalisme berkeyakinan jika kekayaan sumber daya alam adalah untuk dieksploitasi, dikonsumsi untuk pembangunan, dan juga diperdagangkan di pasar Internasional. Isu lingkungan tidak menjadi standar atau parameter proses politik di Negara Barat. Oleh sebab itu, untuk menjadikannya sebuah *mainstream* baru dalam wacana keamanan dukungan dari dunia internasional menjadi hal yang utama (Dalby, 1992:110-115).

Di awal telah dijelaskan bahwa berakhirnya Perang Dingin, perhatian dunia beralih pada keamanan yang bersifat luas. Para ahli studi keamanan yang mencoba mengkonstruksi ulang apa yang disebut dengan 'keamanan'. Sebagai akibat dari perluasan atas konsep *security* tersebut, muncul berbagai macam diskusi untuk menawarkan gagasan atau alternatif isu dalam memahami konstelasi tentang keamanan itu sendiri. Konsep keamanan tidak lagi terbatas pada isu atau dimensi *state security* pada umumnya. Tetapi meluas dan menyentuh level-level paling mendasar dari kebutuhan manusia. Sebagai contoh, sumber ancaman terhadap keamanan baik global, nasional maupun terhadap individu adalah kerusakan lingkungan. Dalam perspektif *environment security*, yang mengancam keamanan global tidak hanya berasal dari kejahatan-kejahatan perang, tetapi kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan kehidupan manusia juga dipahami sebagai ancaman bagi keamanan global. Kegelisahan inilah yang kemudian mendorong dunia internasional untuk mau berkolaborasi demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ahli studi keamanan Barry Buzan, dalam bukunya, *People, States and Fear: An Agendas for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (Buzan, 1991) secara eksplisit telah memasukkan lingkungan sebagai salah satu agenda penting yang dapat mengancam keamanan pasca Perang Dingin. Ia menegaskan bahwa:

*"security is primarily about the fate of human collectivities... about the pursuit of freedom from threat. The bottom line is about survival, but it also*

*includes a substantial range of concern about the condition of existence... security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environmental."*

Lingkungan didefinisikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keamanan itu sendiri. Masalah lingkungan yang dapat mengancam keamanan misalnya, deforestasi, degradasi hutan, krisis air, perubahan iklim yang dapat memicu konflik dan pada titik ekstrim menimbulkan masalah keamanan global.

Sebenarnya, isu lingkungan mulai diwacanakan ke kancah global sejak 1970-an. Vandana Shiva mengungkapkan bahwa gerakan-gerakan pro hijau pada tahun 1970-an yang semula merupakan masalah lokal menjadi awal cerita sukses dalam membawa isu lingkungan sebagai masalah global (Chaturvedi, 1998:703). Kini, hampir setiap negara secara aklamasi menempatkan lingkungan sebagai inti dari konstitusi global sekaligus menjadi ideologi humanisme yang melahirkan jejaring interaksi politik paling kompleks yang tercermin dalam dokumen *World Commission on Environment and Development* (Lay, 2007:154). Tidak heran jika isu lingkungan kemudian menjadi pilar penting dalam studi pembangunan kontemporer. Pembangunan tidak lagi didominasi nalar ekonomi *centric*, tetapi lingkungan telah mengambil perannya dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan (Budiman, 2000:6). Hal yang sama dipertegas oleh Marvin Soroos yang melihat bahwa masalah lingkungan telah menjadi salah satu agenda Internasional sebagai salah satu upaya membangun perdamaian dunia. Ia telah menjadi wacana dominan dalam mendiskusikan konsep keamanan *beyond* tradisional geopolitik dan keamanan militer sebagai upaya untuk kesejahteraan manusia (Soroos, 1994:317).

Beberapa isu utama masalah lingkungan yakni, degradasi hutan, deforestasi, krisis air, perubahan iklim, dan pemanasan global akan menimbulkan dampak terhadap keamanan manusia, keamanan nasional suatu Negara, dan juga terhadap hubungan

antar Negara atau hubungan Internasional secara luas. Kerusakan lingkungan secara luas dan parah, terutama dipicu oleh tingginya emisi karbondioksida yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dunia (*global climate change*) akibat terjadinya pemanasan global. Dari aspek keamanan manusia, perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan bencana di seluruh dunia yang mengancam nyawa jutaan orang. Sebuah ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya terorisme internasional. Perubahan iklim melahirkan permasalahan yang jauh lebih kompleks dengan berbagai penderitaan baru bagi umat manusia. Misalnya, pemanasan global akan berdampak pada iklim yang cepat berubah, dimana perubahan iklim seharusnya hanya berlangsung dalam kurun waktu 30 tahun. Namun, kini perubahan iklim seakan seperti perubahan cuaca yang dapat berubah cepat. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan permukaan air laut (Nainggolan, Tanpa Tahun: 74).

Sebagai contoh di Bangladesh, peningkatan permukaan air laut menyebabkan 7% wilayahnya tenggelam dan memaksa 15 juta penduduknya untuk berpindah pemukiman. Di India, banjir yang menerjang menyebabkan sedikitnya 60 juta orang harus mengungsi. Sedangkan di Mesir harus kehilangan 12%-15% wilayah suburnya, sehingga 75 juta orang harus berpindah akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim akibat gelombang panas yang melanda wilayah Andra Pradesh, India, pada tahun 2003 telah menyebabkan 1.664 orang mati. Sementara di Prancis, suhu udara yang luar biasa panas tahun 2003 telah mengakibatkan 5.000 orang tewas. Di Inggris, musim dingin terekstrim dapat mencapai minus 40 derajat Celcius (Nainggolan, Tanpa Tahun: 75-76).

Fakta empirik di atas sedang menunjukkan betapa dahsyatnya ancaman akibat kerusakan lingkungan terhadap kelangsungan kehidupan di bumi. Kerusakan lingkungan memiliki kekuatan digdaya yang dapat mengganggu keamanan di segala sektor, baik politik, keamanan, ekonomi nasional, maupun wilayah yang lebih luas lagi yakni global. Sangat wajar

apabila kini wacana lingkungan menjadi isu dominan dalam upaya membangun keamanan Internasional, khususnya keamanan manusia. Seperti yang ditegaskan oleh ahli keamanan Barry Buzan yang memasukkan domain lingkungan sebagai salah satu agenda keamanan pasca Perang Dingin. Sementara, Thomas Homer Dixon lebih jauh lagi mengidentifikasi soal ancaman konflik yang bersumber dari masalah-masalah lingkungan, seperti perebutan sumber daya alam yang semakin langka. Ia juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan juga berdampak pada migrasi penduduk dan mengalirnya pengungsi lingkungan (*environmental refugees*) yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan antar negara, stabilitas politik, keamanan dan perdamaian di tingkat regional dan global (Nainggolan, Tanpa Tahun:55).

## PENUTUP: KELUAR DARI PERSPEKTIF NORMATIF

Pokok perhatian tulisan ini adalah bahwa konsep keamanan belum menemui pendefinisian secara utuh. Diskursus keamanan belum sampai perdebatan final. Ia bergerak mengikuti perkembangan atas apa yang dimaksud dengan ancaman. Bergesernya konsep keamanan dari *state security* ke *human security* adalah implikasi dari perkembangan soal ancaman atau bahaya itu sendiri. Dalam kerangka keamanan modern, ancaman bersumber pada persoalan “kita” dan bukan “polisi” maupun “tentara”. Jika teori keamanan tradisional berpijak dengan memahami “ancaman terhadap apa” yang pada awalnya ditekankan pada negara. Maka, di dalam logika keamanan modern itu bergeser menjadi “ancaman dari apa” yang merefleksikan ancaman sebagai hal yang bersifat *ad interim*. Dengan demikian, konsep keamanan kontemporer adalah pertarungan politis atas apa yang dimaksud dengan hal-hal yang “mengancam” kita, baik secara individu ataupun sebagai komunitas masyarakat. Dari pergeseran tersebut melahirkan pola relasi keamanan yang berbeda, jauh lebih rumit dan kompleks, melibatkan *stakeholder* lintas global dan nasional, mempertemukan beragam kepentingan yang tendensinya saling menegaskan. Keamanan dalam perspektif



negara *ansich* tidak lagi relevan untuk menjawab ancaman-ancaman yang bersumber dari non-tradisional.

Pada akhirnya, tulisan ini hendak menjelaskan bahwa diskursus keamanan adalah kajian yang sifatnya *ad infinitum*. Memahami gagasan keamanan adalah mendudukan isu tentang keamanan dalam kajian politik. Keamanan merupakan konsep yang dinamis mengikuti pertarungan wacana atas apa yang disepakati sebagai ancaman bersama. Persoalan keamanan sejatinya bukan berada dalam ranah negara saja. Akan tetapi keamanan sendiri melekat di dalam kepentingan masing-masing individu maupun masyarakat sebagai kolektivitas. Keamanan dalam konteks yang lebih luas, bukan berangkat dari suatu kajian teoritis. Namun, lahir dari kebutuhan praktis yang memberikan implikasi bagi bangunan konsep keamanan itu sendiri. Jika dahulu, mendiskusikan keamanan kerap dikaitkan dengan kajian-kajian yang sifatnya militeristik, perang dan konflik. Kini, diskusi-diskusi keamanan bergeser ke arah survabilitas manusia. Parameter keamanan tidak lagi didasarkan seberapa sering suatu negara berperang atau bagaimana negara mengantisipasi ancaman terhadapnya. Tetapi, bagaimana setiap individu dapat menikmati situasi tanpa ancaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav (2001). *Human Security: East versus West*. International Journal, Vol.56, No.3, pp.442-460.
- Angelsen, A dan Atmadja, S (eds) (2010). *Melangkah Maju Dengan REDD+: Isu, Pilihan dan Implikasi*. Bogor: CIFOR
- Budiman, Arief (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buzan, Barry (1991). *People, State and Fear: An Agendas for Internasional Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf
- Chaturvedi, Sanjay (1998). *Common Security? Geopolitics, Development, South Asia and The Indian Ocean*. Jurnal *Third World Quarterly*, Rethinking Geographies, Taylor and Francis, Vol.19, No.4, 701-724
- Dalby, Simon (1992). *Security, Modernity, Ecology: The Dilemma of Post-Cold War Security Discourse*. Alternative: Global, Local, Political, Vol.17, No.1 hal.110-115
- Hayati, Sri dan Yani, Ahmad (2011). *Geografi Politik*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- King, Gary dan J.L Murray, Christopher (2002). *Rethinking Human Security*. Journal Political Science Quarterly, Vol.116 No.4, pp.585-610.
- Lay, Cornelis (2007). *Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia*. Jurnal Sosial dan Politik UGM, Vol.11, No.2, pp 153-172
- Lay, Cornelis (2009). *Mengenal Keamanan*. Makalah disampaikan sebagai bahan acuan diskusi dalam FGD

dengan Staf Ahli DPR RI, Jakarta, 12 November 2006  
dan disempurnakan Tahun 2009

- MacArthur, Julie (2008). *A Responsibility to Rethink? Challenging Paradigms in Human Security*. International Journal, Vol.63, No.2, pp.422-443.
- Nainggolan, Poltak Partogi (Tanpa Tahun). *Lingkungan Sebagai Masalah Keamanan*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Noer, Deliar. (1996). *Pemikiran Politik Di Negeri Barat: Thomas Hobbes*. Bandung: Mizan.
- Paris, Roland .(2001). *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?*. International Security, Vol.26, No.2 pp.87-112
- Soroos, Marvin S.(1994). *Global Change, Environmental Security, and the Prisoner's Dilemma*. Journal of Peace Research, Vol.31, No.3, pp.317-332
- Tsai, Yu-tai (2009). *The Emergence of Human Security: A Constructivist View*. International Journal of Peace Studies, Vol.14, No.2, pp.19-33.

# BIODATA PENULIS

**ASEP NURJAMAN, DR, M.SI**, dosen yang mengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ini memperoleh gelar doktornya dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mantan dekan FISIP UMM periode 2013-2017 aktif menulis buku. Sejumlah karya ilmiahnya pun telah dipublikasikan melalui jurnal nasional maupun internasional. Beberapa judul buku karyanya yang telah diterbitkan antara lain Mengubur Ideologi Menabur Materi Perilaku Politik Pasca Reformasi: Kasus Pemilu Multi Partai di Malang Raya, Pola Hubungan Partai Dan Pemilih Di Tengah Memudarnya Politik Aliran dan buku berjudul Ketidakstabilan Sistem Kepartaian Dan Kehancuran Politik Aliran. Dapat dihubungi melalui [asepip@umm.ac.id](mailto:asepip@umm.ac.id)

**ANA CORDEIRO, MA**, alumni dari Master Program of Social Education and Community Intervention Lisbon Polytechnic Institute, Portugal ini lahir di Portugis tahun 1988. Dosen yang ahli dalam *social education* dan *community intervention* ini memiliki banyak pengalaman dalam mengelola sejumlah program-program pendidikan. Pernah menjadi bagian dari produksi pertukaran budaya internasional di Polandia, Ana Cordeiro juga sering berkerjasama menjalin jaringan organisasi yang bergerak dalam bidang peningkatan kualitas hidup anak-anak di sejumlah negara. Saat ini ia mengabdikan sebagai dosen *internship* di Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya mengajar di bidang *culture in education* di FKIP dan mengajar *quantitative research methods* di FISIP.

**BUDI SUPRAPTO, PH.D, M.SI**, doktor alumni Universiti Malaya, Malaysia ini menyelesaikan disertasinya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Dakwah Terhadap Kepedulian Sosial Politik pada tahun 2014. Saat ini mengajar sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi sekaligus menjabat sebagai Asisten Rektor Bidang Pengembangan Akademik. Sejumlah karya buku dan karya ilmiah telah diterbitkan baik dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Buku karyanya yang telah diterbitkan diantaranya berjudul Konsepsi Internet Sebagai Forum Publik dan buku Media Massa dan Komunikasi Dakwah. Beberapa karya ilmiahnya telah diterbitkan di sejumlah jurnal internasional diantaranya diterbitkan di jurnal New Media and Mass Communication dan di Jurnal Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

**DEMEIATI NUR KUSUMANINGRUM, MA** merupakan dosen Prodi Hubungan Internasional sejak 2013. Ia meraih gelar Sarjana dan Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2009) dan Universitas Gadjah Mada (2012). Biasa dipanggil Ningrum, perempuan ini menaruh keminatan pada politik luar negeri, kerjasama pembangunan dan rezim perdagangan. Ia aktif sebagai pengelola Jurnal Sospol dan peneliti pada Center for Intermestic Studies (CIS), Universitas Muhammadiyah Malang. Beberapa publikasi Ningrum antara lain: Ekonomi Politik Kerjasama Pembangunan (Gre, 2014), BRC Certification as the Challenge for MNC's Global Sales: PT. Betts Indonesia (USNI, 2015), Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia (Jurnal Sospol, Vol 2 No 1 2016), Good Governance for Sustainable Development: Municipal Waste Management (JILS Vol 1 No 1, 2017). Penulis dapat dihubungi pada email:

[demeiati.kusumaningrum@gmail.com](mailto:demeiati.kusumaningrum@gmail.com)

**DION MAULANA PRASETYA, MA** saat ini mengabdikan sebagai dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Menyelesaikan studi S2 di prodi Hubungan Internasional Universitas Airlangga, dengan

konsentrasi studi Globalisasi dan Strategi. Semenjak kuliah rajin menulis artikel populer yang diterbitkan di media massa, baik lokal maupun nasional. Tercatat puluhan artikel populer dan jurnal, maupun bab dalam buku telah diterbitkan. Saat ini penulis sedang menggeluti kajian Teori Hubungan Internasional Alternatif dengan mengacu pada sejarah politik maupun pemikiran Jawa di masa lalu. Penulis bisa dihubungi melalui [dionprasetya@gmail.com](mailto:dionprasetya@gmail.com)

**GONDA YUMITRO, MA** ([yumitro@gmail.com](mailto:yumitro@gmail.com) dan [gonda@umm.ac.id](mailto:gonda@umm.ac.id)) adalah Lektor pada Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Ia menyelesaikan sarjana pada Prodi Hubungan Internasional UGM, dan M.A Political Science dan M.A International Relations, masing-masing di Jamia Millia Islamia, India dan Annamalai University, India. Fokus kajian yang ia dalami adalah politik Islam dan Isu dunia Islam. Beberapa publikasinya bisa diakses <https://umm.academia.edu/GondaYumitro>.

**LISTIANA ASWORO S.IP, MA**, dilahirkan di Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 6 Februari 1989. Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM ini menempuh Pendidikan Tinggi Strata 1 dan Strata 2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa juga aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia dipercaya menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti Divisi PSDM BEM KM UGM, Staf Khusus Bidang Riset dan Teknologi KOMAP (Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan), dan juga aktif menulis di majalah kampus SINTESA. Selain itu, ia pernah menjadi Ketua Keluarga Pemuda Pelajar Pacitan (KP3) Yogyakarta selama 1 periode. Ia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan terlibat menjadi volunteer di NGO Lingkar Yogyakarta ketika terjadi bencana Erupsi Merapi. Saat ini, ia mengabdikan sebagai dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM. Fokus kajiannya adalah Politik Keamanan, terlebih pada isu Human Security. Selain itu, ia juga menekuni studi tentang Demokrasi dan Civil Society,

khususnya isu tentang social movement dan politics movement. Penulis bisa dikontak melalui [listianaasworo06@gmail.com](mailto:listianaasworo06@gmail.com)

**NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL, S.IP., M.HUB.INT.** adalah pengajar pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sejak 2015. Lahir dan dibesarkan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan pada 4 Januari 1991. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi HI FISIP UMM tahun 2013 dan S-2 pada Program Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tahun 2015. Tulisan ilmiahnya antara lain diterbitkan pada Jurnal Global dan Strategis, Jurnal Opinio Juris Kemenlu RI, Jurnal Sospol, dan Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional serta aktif menulis di media massa lokal antara lain Harian Bhirawa, Koran Pantura, dan Duta Masyarakat. Karyanya antara lain dua kumpulan puisi Memoar Tanah Rantau dan Jejak Rantau (Dapur Buku Jakarta, 2013), *Militer dalam Transisi Demokrasi: Pengalaman Tunisia dan Mesir* (Revka Petra Media Surabaya, 2014), serta buku bunga rampai Malang Undercover: Investigasi Kisah-Kisah Inspiratif (Buku Litera Yogyakarta, 2012), Antologi puisi Kembalilah Siswa-Siswa Semesta (Almatera Yogyakarta, 2013), dan *Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN* (PKSP dan Buku Litera, Yogyakarta, 2016). Dapat dihubungi di email [nkhairurrijal@gmail.com](mailto:nkhairurrijal@gmail.com).

**OMAN SUKMANA, DR, M.SI.** Lahir di Sumedang pada tanggal 09 Pebruari 1966. Menempuh pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD Bandung lulus tahun 1991; S-2 Psikologi Bidang Kajian Utama (BKU) Psikologi Sosial pada Program Pascasarjana UNPAD lulus tahun 1997; dan S-3 Sosiologi di Fisipol UGM lulus tahun 2016. Buku yang telah diterbitkan antara lain: *Etika Profesi Pekerjaan Sosial* (UMM Press, 1999), *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan* (Bayu Media, 2003), *Sosiologi dan Politik Ekonomi* (UMM Press, 2005), *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (Intrans

Publishing, 2014, Penulis Team), Mozaik Kebijakan Sosial Politik (FISIP UMM 2015, Penulis Team), Konsep dan Teori Gerakan Sosial (Intrans Publishing, 2016), dan Pergulatan di Medan Lumpur: Potret Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo dalam Melawan Dominasi Negara dan Korporasi (2017).

**RACHMAD K DWI SUSILO, MA.** Lahir di Magelang, 10 Oktober 1974. Riwayat Pendidikan, S-1 Jurusan Sosiologi FISIP UNS, Surakarta, (1994-1999) dan S-2 Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM Jogjakarta (2008-2010). Pada saat kuliah S-2 meniatkan diri untuk mengembangkan kajian Sosiologi Pembangunan Lingkungan (Sosiologi Ecodevelopment). Saat ini sebagai Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Buku-Buku yang telah dipublikasikan yaitu Integrasi Ilmu Sosial, Memadukan Ilmu Sosial Tiga Peradaban (2005), Sosiologi Kependudukan, Pemikiran Teori dan Analisa Sosiologis Di Balik Fenomena Kependudukan (2006), Memahami Kecerdasan Orang-Orang Sukses: Refleksi Sosiologis Orang-Orang Ternama dalam Mensiasati Hidup (2007), 20 Tokoh Sosiologi Modern (2008), Jangan Goblok Melakoni Hidup (2010), Co-management Air Minum untuk Kesejahteraan Masyarakat (2011), Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (2013), Sosiologi Lingkungan (cetakan ke-4, 2014) dan Modul Pelatihan : Penguatan Co-Management Organisasi Air Minum Berbasis Komunitas untuk Pencegahan Konflik Sosial (2014) dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan: Konsep dan Praktik Lapang (2016).

**SAIMAN, DR.** Lahir di Merotai 29 September 1966, menempuh Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Pendidikan S1 Hubungan Internasional UNHAS (1985), S2 Adm. Pembangunan dan Lingkungan UNHAS (1994) dan S3 Ilmu Politik UI (2010). Sejak tahun 1991 menjadi dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Karya



ilmiahnya antara lain Kebijakan Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (1997), Pengantar Pembangunan (2004), Atropologi Politik (2005), Tantangan Budaya Nasional di Era Globalisasi (2009), dan Kebijakan Politik Perbatasan Indonesia (2011) serta Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Indonesia-Malaysia Pasca Reformasi (Studi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara), Disertasi Ilmu Politik UI 2016. Kontak email: [saimanmhhdri@gmail.com](mailto:saimanmhhdri@gmail.com)

**SHANNAZ MUTIARA DENIAR, MA** lahir di Bandung, 5 Juni 1989. Saat ini tercatat sebagai Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Jurusan International Development Cooperation, Park Chung Hee School of Policy and Saemaul, Yeungnam University dengan Beasiswa Penuh dari Provinsi Gyeongsangbukdo, Korea Selatan. Pernah bekerja di Departement of Saemaul Undong, Tourism, and Culture Kantor Walikota Gimcheon, Korea Selatan. Fokus kajian penulis adalah International Development, Community Development, dan Saemaul Undong; selain sekali-sekala travelling di waktu senggang. Penulis dapat dihubungi melalui [shannaz.deniar@gmail.com](mailto:shannaz.deniar@gmail.com)

**WINDA HARDYANTI**, dosen yang mengabdikan di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 2010. Tahun 2008, lulus dari program sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga dan S2 di Magister Sosiologi konsentrasi Sosiologi Komunikasi UMM tahun 2013. Kecintaannya pada dunia tulis menulis dan jurnalistik membawanya berkarir sebagai reporter radio selama dua tahun di Radio Trijaya FM Surabaya dan freelance journalist di Majalah Gapura milik Pemkot Surabaya selama delapan tahun. Dapat dihubungi melalui email [winda86@gmail.com](mailto:winda86@gmail.com)